

Modal Sosial Dalam Pemilihan Legislatif Daerah di Kota Mataram

Dwi Alam Ananami Putra*, Ach Faiq, Alvin Pasza Bagaskara
Universitas Indonesia, Depok, Indonesia

Kata Kunci

Kata kunci: *Social Capital, Pemilihan Legislatif Mataram, Legislator Hindu*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keterkaitan Social Capital (Bourdieu, 1986) dan relasi etnisitas terhadap kemenangan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Mataram yang beragama Hindu pada local election atau Pemilihan Legislatif Daerah (Pilegda) tahun 2024. Para legislator Hindu tersebut sukses memperoleh kursi wakil rakyat karena pengaruh modal sosial yang mereka miliki. Oleh karena itu, penelitian ini mengeksplorasi bagaimana mekanisme modal sosial dan hubungan relasi etnisitas pada kemenangan legislator Hindu di Kota Mataram. Penelitian ini mempekerjakan metodelogi kualitatif dengan pendekatan Systemic Literatur Review (SLR) yang mencakup analisis literatur mengenai relevansi teori modal sosial Bourdieu dan teori relasi etnisitas pada kemenangan legislator Hindu di Kota Mataram. Hasil penelitian menunjukkan bahwa modal sosial dan relasi etnisitas berkontribusi terhadap kemenangan anggota legislatif Kota Mataram pada Pilegda 2024.

Keywords

Keywords: Social Capital, Mataram Legislative Election, Hindu Legislators

Abstract

This study aims to analyze the relationship between Social Capital (Bourdieu, 1986) and ethnic relations towards the victory of Hindu members of the Mataram City Regional People's Representative Council (DPRD) in the 2024 local election or Regional Legislative Election (Pilegda). These Hindu legislators were successful in obtaining seats because of the influence of their social capital. Therefore, this study explores how the mechanism of social capital and the relationship of ethnic relations to the victory of Hindu legislators in Mataram City. This study employs a qualitative methodology with a Systemic Literature Review (SLR) approach that includes literature analysis regarding the relevance of Bourdieu's social capital theory and ethnic relations theory to the victory of Hindu legislators in Mataram City. The results of the study show that social capital and ethnic relations contribute to the victory of Mataram City legislative members in the 2024 Pilegda.

*Corresponding Author: **Dwi Alam Ananami Putra**, Universitas Indonesia, Depok, Indonesia;
Email: Ananamikae@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.29303/jseh.v11i3.882>

History Artikel:

Received: 14 Agustus 2025 | Accepted: 29 September 2025

PENDAHULUAN

Demokrasi elektoral membawa para elite politik. Pasalnya, para elite politik tersebut dihasilkan lewat suatu proses yang demokratis. Maka, diharapkan praktik-praktik kekuasaan mereka juga mengejawantahkan prinsip dasar demokrasi. Prinsip dasar itu adalah terbukanya kesempatan dan akses masyarakat dalam proses penentuan kebijakan pembangunan. Prosedur demokrasi dalam pemilihan anggota legislatif

daerah dan kepala daerah tidak hanya untuk menciptakan para elite politik (DPRD dan Kepala Daerah) yang aspiratif, responsif, representatif. Lebih jauh dari itu, para elite politik diharapkan dapat menghasilkan kebijakan-kebijakan pembangunan di tingkat lokal yang juga aspiratif, responsif, dan inklusif (Ruman, 2015). Pada tahun antara jatuhnya rezim Soeharto tahun 1998 dan diperkenalkannya pemilihan umum daerah pada tahun 2005, Indonesia telah mengalami proses

demokratisasi dan desentralisasi yang saling terkait. Demokratisasi membuka partisipasi politik, membuat pemilihan umum lebih bebas dan memberi mereka peran yang lebih sentral dalam menentukan siapa yang akan menduduki jabatan politik tinggi. Sementara desentralisasi melimpahkan kewenangan politik dan sumber daya keuangan ke provinsi dan kabupaten/kota (Aspinall, 2017).

Demokrasi ada sebagai upaya untuk mengakhiri dominasi kekuasaan oleh satu orang atau sekelompok orang atas yang lain. Demokrasi mendorong pembentukan pemerintahan yang representatif. Gagasan representasi politik kemudian menjadi inti dari sistem politik yang demokratis. Lembaga legislatif dianggap sebagai wadah representasi yang unik. Sama seperti potret representatif yang tampak seperti pelayan atau pengasuh, lembaga parlemen dipandang sebagai representatif jika secara akurat mencerminkan komposisi representasi masyarakat (Syafhendry et al., 2023). Menurut John Adams, legislatif harus menjadi potret sejati, dalam bentuk miniatur, dari orang-orang pada umumnya, sebagaimana mereka seharusnya berpikir, merasakan, bernalar, dan bertindak. Oleh karena itu, desentralisasi politik diharapkan dapat mengurangi kekuasaan pemerintah pusat dan meningkatkan akuntabilitas lembaga-lembaga lokal dan politisi yang dipilih secara langsung. Desentralisasi politik juga diasumsikan mampu merangsang pemulihhan hubungan politik di daerah dalam hal partisipasi politik (Choi, 2011).

Undang-Undang (UU) No. 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah telah memberi kekuasaan yang begitu besar kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan bupati/wali kota sebagai kepala daerah. Berdasarkan UU ini, DPRD memiliki tugas dan wewenang seperti di pasal 18, yaitu memilih, mengusulkan pemberhentian, dan memberhentikan kepala daerah. Pasal 19 UU ini juga memberikan hak kepada DPRD untuk meminta pertanggungjawaban, keterangan kepala daerah, dan mengadakan penyelidikan serta perubahan atas Rancangan Peraturan Daerah.

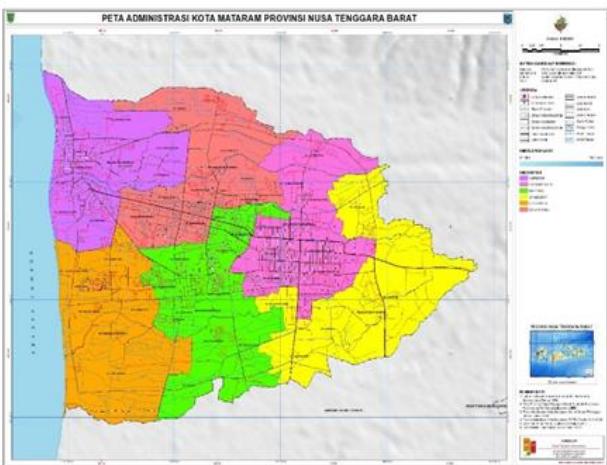
Secara sosiologis UU tersebut memuat sekurang-kurangnya dua makna penting. Pertama, secara normatif DPRD merupakan satu-satunya representasi kedaulatan rakyat. Hal ini disebabkan oleh semua anggota DPRD dipilih langsung oleh

rakyat. Kedua, basis sosial dari kekuasaan setiap anggota DPRD adalah rakyat yang memilih mereka. Selain didukung secara legal dan normatif, secara sosiologis, otoritas sosial dan politik setiap anggota DPRD menjadi sangat kuat. Tulisan ini merupakan kajian sosiologi politik yang menganalisis keterpilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) beragama Hindu pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 di Kota Mataram. Fenomena ini menarik untuk diteliti karena para legislator Hindu tersebut meskipun bukan termasuk dari populasi terbanyak berdasarkan agama di Kota Mataram, tetapi mereka suskses tampil dan terpilih dalam kontestasi politik daerah, khususnya pada momentum pemilihan legislatif tahun 2024.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2023 jumlah umat Hindu di Kota Mataram sebanyak 62.622 orang. Jumlah tersebut memposisikan umat Hindu sebagai penduduk berdasarkan agama kedua terbanyak setelah umat Islam yang berjumlah 375.250 orang (mataramkota.bps.go.id). Sebelumnya, studi yang dilakukan Sujatmiko (2014), menjabarkan kehadiran tokoh politik Sunda di kancah nasional relatif rendah walaupun mereka merupakan kelompok mayoritas terbesar kedua di Indonesia. Terbukti dari total empat puluh Anggota DPRD Kota Mataram terpilih pada Pemilu 2024, tujuh orang diantaranya merupakan bagian dari kelompok umat Hindu. Selain itu, para legislator Hindu tersebut berasal dari partai yang berbeda-beda. Hal ini menandakan bahwa eksistensi umat Hindu pada level perpolitikan daerah mampu mewarnai dinamika demokrasi lokal di Kota Mataram. Para figur tersebut bisa bersaing dengan kompetitor lain secara demokratis walau terbilang bukan kelompok mayoritas.

Solidaritas kelompok, modal sosial, dan relasi etnisitas menjadi faktor penentu dalam kemenangan para legislator Hindu tersebut. Sebagai kelompok minoritas, mereka memerlukan modal sosial seperti jaringan sosial, kepercayaan, dan kepemimpinan yang dimiliki untuk memperkuat basis dukungan politik pada Pileg 2024. Sementara relasi etnisitas berperan untuk membuka dukungan dari kelompok yang berbeda. Sebut saja dukungan dari umat Islam yang notabene sebagai kelompok mayoritas di Kota Mataram. Secara administratif, Kota Mataram terdiri dari 6 kecamatan, 50 kelurahan, 325 lingkungan dan 1.673 Rukun Tetangga (BPS Kota Mataram 2020).

Gambar 1. Peta Kota Mataram



Oleh sebab itu, dalam penelitian ini, konsep modal sosial yang diperkenalkan oleh Pierre Bourdieu (1986), digunakan sebagai kerangka teori untuk menjelaskan proses kemenangan tujuh legislator Hindu di Kota Mataram. Para politisi beragama Hindu tersebut memperoleh kursi sebagai wakil rakyat tidak lepas dari modal sosial dan relasi etnisitas yang diperankan. Dalam lingkup kajian sosiologi politik, kajian mengenai politik pemilihan legislatif di daerah dalam tinjauan modal sosial dan keterkaitannya dengan relasi etnisitas masih jarang ditemukan.

Modal sosial merupakan agregat sumber daya yang terhubung dengan keanggotaan dalam kelompok tertentu, sumber daya ini dapat berkembang biak di internet dan melalui ikatan dan keanggotaan yang dimiliki individu di sana (Bourdieu, 1986). Dalam pandangan Bourdieu, modal tidak hanya merujuk pada aset ekonomi seperti uang atau properti, tetapi juga mencakup sumber daya lain yang dapat memberikan keuntungan dalam konteks sosial tertentu. Modal adalah instrumen yang memungkinkan individu atau kelompok untuk mempertahankan atau meningkatkan posisi mereka dalam struktur sosial. Pemikiran ini berakar pada analisis Bourdieu tentang bagaimana kekuasaan dan dominasi dipertahankan melalui berbagai bentuk sumber daya (Swartz, 1997).

Menurut Bourdieu, modal sosial tidak dapat dipisahkan dari jaringan hubungan sosial. Nilai modal sosial bergantung pada ukuran jaringan sosial seseorang dan volume modal ekonomi dan budaya yang dimiliki oleh anggota

jaringan tersebut. Dengan kata lain, modal sosial bersifat relasional: kekuatannya terletak pada kemampuan untuk memanfaatkan hubungan sosial untuk keuntungan tertentu (Coleman, 1988). Oleh sebab itu, penelitian ini akan menyajikan penyelidikan empiris pemaparan temuan eksploratif metode kualitatif pendekatan studi kasus (Neuman, 2014). Oleh karena itu, artikel ini hadir untuk mengisi kekosongan studi sosiologi politik mengenai kelompok minoritas Hindu menjadi politisi di Indoensia dengan menjelaskan kekuatan modal sosial dan relasi etnisitas para aktor di lingkup Kota Mataram dalam merebut posisi di arena politik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan mengeksplorasi secara mendalam bentuk, peran, dan dinamika modal sosial dalam proses pemilihan anggota legislatif tahun 2024 di Kota Mataram. Pendekatan ini dipilih karena bersifat kontekstual dan mampu menggambarkan fenomena sosial-politik secara holistik. Menurut Moleong (2016), penelitian kualitatif berupaya memahami makna di balik tindakan, persepsi, dan interaksi sosial yang dialami oleh subjek penelitian secara menyeluruh dalam konteks alamiah.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode *Systematic Literature Review* (SLR). Pendekatan SLR dipilih karena memungkinkan peneliti meninjau berbagai literatur secara sistematis, menyeluruh, dan objektif, sehingga dapat menghasilkan sintesis pengetahuan yang valid dan kredibel. Sebagaimana ditegaskan oleh Vårheim et al. (2019), tinjauan kualitatif sistematis yang mencakup proses pencarian literatur yang terstruktur dan transparan diperlukan untuk menjamin keandalan dan akurasi hasil analisis.

Melalui pendekatan ini, penelitian berfokus pada bagaimana modal sosial beroperasi dalam arena politik lokal, khususnya dalam Pemilihan Legislatif Daerah (Pilegda) 2024 di Kota Mataram. Fokus penelitian diarahkan pada keterkaitan antara modal sosial dan faktor etnisitas, terutama pada kelompok legislator beragama Hindu yang berhasil memperoleh kursi di DPRD Kota Mataram.

Pertanyaan penelitian yang menjadi panduan analisis adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana keterkaitan modal sosial dengan kemenangan tujuh legislator Hindu pada

Pemilihan Legislatif Daerah Kota Mataram tahun 2024?

2. Bagaimana posisi etnisitas dan hubungannya dengan modal sosial para legislator Hindu dalam konteks politik lokal di Kota Mataram?

Penelitian ini memiliki kontribusi signifikan dalam bidang sosiologi politik, khususnya pada kajian modal sosial dan etnisitas dalam kontestasi politik lokal. Studi tentang hubungan antara social capital dan pemilihan legislatif daerah di Pulau Lombok, khususnya di Kota Mataram, masih jarang dilakukan, sehingga penelitian ini diharapkan dapat mengisi kekosongan tersebut.

Selain itu, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi empiris dan teoretis terhadap pemahaman dinamika politik lokal di Nusa Tenggara Barat (NTB), khususnya dalam melihat peran modal sosial dan identitas etnis dalam membentuk strategi serta keberhasilan politik para kandidat legislatif. Unit analisis dalam penelitian ini adalah para politisi Hindu yang memperoleh kursi legislatif pada Pilegda 2024 di Kota Mataram.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Representasi Politik Umat Hindu di Kota Mataram

Umat Hindu merupakan kelompok minoritas di Kota Mataram. Namun demikian, pada Pemilihan Legislatif Daerah (Pilegda) tahun 2024, keterwakilan politik umat Hindu menunjukkan capaian signifikan dengan terpilihnya tujuh legislator beragama Hindu ke kursi DPRD Kota Mataram periode 2024–2029. Fakta ini menunjukkan bahwa demokrasi lokal di Kota Mataram memberikan ruang partisipasi politik yang terbuka bagi seluruh warga tanpa membedakan latar belakang agama maupun etnisitas.

Kemenangan para legislator Hindu ini tidak hanya menggambarkan keberhasilan individu, tetapi juga mencerminkan peran strategis modal sosial yang dimiliki oleh para aktor politik tersebut dalam membangun jaringan dukungan di masyarakat. Modal sosial, dalam konteks ini, menjadi faktor penentu yang memperkuat posisi politik mereka di tengah persaingan elektoral yang kompetitif.

Tabel 1. Legislator Hindu Kota Mataram Terpilih Periode 2024–2029

No.	Nama	Partai
1.	I Nengah Sugiartha	Nasional Demokrat (NasDem)
2.	I Wayan Wardana	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)
3.	Ni Luh Arini	PDIP
4.	I Gusti Bagus Hari Sudana Putra	Demokrat
5.	I Nyoman Yogantara	PDIP
6.	I Gusti Bagus Alit Winata	Gerindra
7	I Gede Wiska	PDIP

Hasil ini menunjukkan bahwa partisipasi politik umat Hindu di Kota Mataram telah berkembang secara signifikan. Meskipun merupakan kelompok minoritas, umat Hindu berhasil menempatkan wakilnya di lembaga legislatif daerah melalui jaringan sosial yang kuat, kepercayaan masyarakat, dan strategi politik berbasis komunitas.

Selain modal sosial, faktor etnisitas juga berperan dalam memperkuat identitas politik para legislator Hindu. Meskipun etnisitas bukan fokus utama penelitian ini, namun ia menjadi variabel penting yang memperkuat hubungan sosial-politik dalam proses elektoral. Etnisitas Hindu di Mataram telah lama membentuk jaringan sosial yang kohesif, sehingga menjadi kekuatan simbolik dan kultural yang mendukung keberhasilan politik para kandidat.

Modal Sosial dalam Perspektif Pierre Bourdieu

Menurut Bourdieu (1986), modal sosial merupakan agregasi sumber daya aktual atau potensial yang terkait dengan kepemilikan jaringan hubungan sosial yang bersifat saling mengenal dan saling mengakui. Dengan kata lain, modal sosial merupakan bentuk keanggotaan dalam suatu kelompok yang memberikan dukungan kolektif terhadap setiap individu di dalamnya.

Hubungan sosial dalam modal sosial hanya dapat terbentuk melalui praktik sosial yang berulang, baik dalam bentuk pertukaran material

maupun simbolik, yang berfungsi untuk mempertahankan hubungan tersebut. Bourdieu menegaskan bahwa volume modal sosial yang dimiliki seseorang bergantung pada luasnya jaringan hubungan yang dapat dimobilisasi secara efektif serta pada besarnya modal ekonomi, budaya, atau simbolik yang dimiliki oleh individu dalam jaringan tersebut.

Dalam konteks penelitian ini, kemenangan legislator Hindu di Kota Mataram dapat dipahami sebagai hasil dari kemampuan mereka mengelola jaringan sosial berbasis kepercayaan, solidaritas, dan keterikatan sosial yang kuat di antara komunitas Hindu. Hal ini memperlihatkan bagaimana habitus, modal, dan ranah (Bourdieu, 1986) berinteraksi membentuk praktik sosial-politik yang mengarah pada keberhasilan elektoral.

Habitus menggambarkan disposisi dan kecenderungan perilaku yang terbentuk dari pengalaman sosial-politik umat Hindu di Mataram. Ranah politik lokal berfungsi sebagai arena di mana para aktor bersaing untuk memperoleh sumber daya (kursi legislatif) dengan memanfaatkan modal yang mereka miliki. Modal sosial melalui jaringan komunitas, asosiasi keagamaan, dan hubungan antarindividu menjadi sarana utama dalam membangun dukungan elektoral.

Dengan demikian, kemenangan legislator Hindu tidak hanya ditentukan oleh kemampuan personal, tetapi juga oleh struktur sosial yang menopang mereka. Modal sosial berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan aktor politik dengan konstituen melalui hubungan kepercayaan dan solidaritas kolektif.

Relasi Etnisitas dalam Dinamika Politik Lokal

Identitas etnis dan agama tetap menjadi faktor penting dalam politik lokal di Indonesia. Seperti yang dikemukakan oleh Warganegara dan Waley (2024), etnisitas dan agama sering kali berkelindan dalam membentuk identitas politik yang memengaruhi perilaku pemilih di tingkat lokal. Chandra (2012) menjelaskan bahwa etnisitas tidak semata-mata merupakan atribut keturunan, melainkan juga konstruksi sosial yang bersifat dinamis, tergantung pada konteks dan interaksi sosialnya.

Dalam konteks Kota Mataram, etnisitas Hindu memegang peran simbolik dalam

membangun kohesi sosial dan solidaritas komunitas. Kehadiran organisasi sosial, lembaga keagamaan, serta kegiatan budaya menjadi arena reproduksi identitas etnis sekaligus ruang penguatan jaringan sosial politik.

Varshney (2001) membedakan dua bentuk hubungan etnisitas dalam masyarakat sipil, yaitu intra-ethnic engagement dan inter-ethnic engagement. Hubungan intra-etnis menggambarkan kohesi internal komunitas, sedangkan hubungan antar-etnis mencerminkan interaksi dan kerjasama lintas kelompok. Dalam konteks Kota Mataram, kedua bentuk relasi ini berperan penting dalam menciptakan stabilitas politik dan menghindari potensi konflik etnis.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa para legislator Hindu tidak hanya mengandalkan jaringan intra-etnis dalam memperoleh dukungan, tetapi juga membangun jejaring inter-etnis yang bersifat inklusif dan kolaboratif. Pola interaksi ini memperkuat posisi politik mereka di masyarakat multikultural Kota Mataram serta menjadi wujud nyata penerapan nilai-nilai demokrasi inklusif di tingkat lokal.

Implikasi Sosio-Politik

Hasil penelitian ini memiliki implikasi terhadap kebijakan penyelenggaraan Pemilu, khususnya dalam konteks demokrasi lokal di Indonesia. Keterlibatan aktif kelompok minoritas seperti umat Hindu di Kota Mataram menunjukkan bahwa demokrasi Indonesia semakin terbuka dan partisipatif.

Temuan ini menegaskan pentingnya menjaga kedaulatan rakyat dan memperkuat partisipasi politik semua kelompok sosial. Modal sosial dan etnisitas, apabila dikelola secara positif, dapat menjadi kekuatan konstruktif dalam memperkuat kohesi sosial serta mewujudkan demokrasi yang inklusif dan berkeadilan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa modal sosial dan relasi etnisitas merupakan dua faktor fundamental yang berperan signifikan dalam keterpilihan tujuh legislator Hindu pada Pemilihan Legislatif Daerah (Pilegda) tahun 2024 di Kota Mataram. Meskipun komunitas Hindu merupakan kelompok minoritas secara demografis, hasil penelitian ini menegaskan bahwa kekuatan jaringan sosial, tingkat kepercayaan (trust), serta solidaritas

komunitas berperan penting dalam membentuk basis dukungan politik yang efektif.

Dengan menggunakan kerangka teori modal sosial Pierre Bourdieu, penelitian ini menemukan bahwa keberhasilan politik legislator Hindu tidak hanya ditentukan oleh faktor internal komunitas, tetapi juga oleh relasi lintas etnis yang inklusif. Dukungan dari kelompok mayoritas, khususnya komunitas Muslim, menunjukkan adanya bentuk *inter-ethnic relations* yang harmonis dan produktif dalam arena politik lokal.

Fenomena tersebut menggambarkan praktik demokrasi lokal yang terbuka, partisipatif, dan berorientasi pada meritokrasi sosial. Dalam konteks metodologis, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui *Systematic Literature Review* (SLR), yang berkontribusi dalam memperkaya kajian sosiologi politik, khususnya terkait peran kelompok minoritas dalam kontestasi politik lokal di Indonesia.

SARAN

Berdasarkan hasil temuan, penelitian ini merekomendasikan agar penguatan modal sosial dan pembangunan relasi etnis yang inklusif terus dikembangkan dalam dinamika politik lokal. Pemerintah daerah, partai politik, dan organisasi masyarakat sipil perlu memfasilitasi ruang-ruang dialog lintas etnis dan agama guna memperkuat kohesi sosial dan partisipasi politik yang berkeadilan.

Selain itu, penelitian lanjutan disarankan untuk memperluas fokus pada studi komparatif di daerah lain, agar diperoleh pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai strategi politik kelompok minoritas dalam konteks demokrasi lokal Indonesia. Penelitian mendatang juga dapat menggunakan pendekatan etnografi atau wawancara mendalam untuk memperkaya temuan empiris terkait dinamika sosial dan politik antar komunitas.

Ucapan Terima Kasih

Penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam pelaksanaan dan penyusunan penelitian ini. Ucapan terima kasih khusus ditujukan kepada para akademisi, peneliti, dan komunitas

masyarakat yang telah menjadi sumber inspirasi dan rujukan ilmiah, sehingga penelitian ini dapat memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan kajian sosiologi politik di Indonesia, khususnya dalam konteks demokrasi lokal dan dinamika kelompok minoritas.

DAFTAR PUSTAKA

- Ananda, Reninta. 2021. Modal Politik dan Modal Sosial Athari Gauthi Ardi Pada Kemenangan Pemilu Legislatif Tahun 2019 di Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Desentralisasi Kebijakan Publik*. Vol. 2 No. 1
- Arie Oktara. 2016. Politik Tuan Guru di Nusa Tenggara Barat. Government: *Jurnal Ilmu Pemerintahan* Volume 8, Nomor 2, Juli 2015 (73-82) ISSN 1979-5645
- Arizka Warganegara & Paul Waley. 2024. Do ethnic politics matter? Reassessing the role of ethnicity local elections in Indonesia. *South East Asia Research*, 32:3,245-262. <https://doi.org/10.1080/0967828X.2024.2406791>
- Aspinall and Mas'udi. 2017. The 2017 Pilkada (Local Elections) in Indonesia: Clientelism, Programmatic Politics and Social Networks. *Contemporary Southeast Asia* Vol. 39, No. 3. pp. 417–26
- Bourdieu, Pierre. (1986). The Forms of Capital. In: Richardson J (ed.) *Handbook of Theory and Reform in the Sociology of Education*. New York: Green.
- Chandra, Kanchan. 2012. “Introduction.” In *Constructivist Theories of Ethnic Politics*, edited by Kanchan Chandra, 1–22. Oxford: Oxford University Press.
- Efendi, Aksan. 2023. Modal Sosial Dalam Kontestasi Pemilihan Kepala Desa Lohia Kecamatan Lohia Kabupaten Muna. *Jurnal Politik dan Demokrasi*. Vol. 1, 121 – 128
- Faisal, Sanapiah.1990. Penelitian Kualitatif (dasar-dasar dan aplikasi). Malang: Ya3 Malang.
- Goebel, Zane. 2013. The Idea of Ethnicity in Indonesia. *Tilburg Papers in Culture Studies* 71. Tilburg
- Laksmi, Ida Ayu Nyoman W. 2021. Management of Financial at Hindu Family In Maataram Lombok. *Technium Social Sciences Journal* Vol. 20, 529-539. <https://mataramkota.bps.go.id/id/statistics->

- table/2/MTk3IzI=/penduduk-menurut-agama.html
- Moleong, Lexy J. 2012. Metode Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi. Cetakan ketigapuluhan. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Muh. Saiful Anwar. 2016. Dinamika Politik Tuan Guru di Lombok Era Reformasi. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Nankyung Choi. 2011. Local Politics in Indonesia. Pathways to Power, Taylor and FrancisGroup.<http://ebookcentral.proquest.com/lib/indonesiauebooks/detail.action?docID=9577>
- Neuman, W. Lawrence. 2014. Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches. Seventh Edition
- Ni'mah, Manzilatun. 2015. Transformasi Selebriti Menjadi Politisi: Urgensi Personal Front Dalam Ranah Sosial. Informasi Kajian Ilmu Komunikasi. Vol. 45 No. 2
- Ruman, Yustinus Suhardi. 2015. "Praktik Demokrasi Pasca-Pemilu Di Tingkat Lokal: Preferensi Para Aktor Elite Dalam Perspektif Teori Pilihan Rasional." Humaniora 6 (2): 264-71. <https://doi.org/10.21512/humaniora.v6i2.3340>.
- Sukandarrumidi. 2002. Metodelogi Penelitian (Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula). Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Suparto. 2022. Analisis Modal Sosial Dalam Kemenangan Pilkada Pemalang 2020. Jurnal Analisa Sosiologi. Vol. 11, 1 – 12
- Syafhendry et al. 2023. Political Party Preferences On Local Election in Indonesia: How Does Rational Choice Institutionalism Work in Candidate Selection? Journal of Liberty and International Affairs | Volume 9 · Number 3 · 2023 | eISSN 1857-9760
- Utami, Sri Arfanti. 2024. Kekuatan Modal Sosial Dalam Kontestasi Pemilihan Kepala Desa Di Kontunaga (Studi Kasus Keterpilihan Dahlan). Jurnal Politik dan Demokrasi. Vol. 2, 70 – 77
- Vårheim, A., Skare, R., & Lenstra, N. (2019). Examining libraries as public sphere institutions: Mapping questions, methods, theories, findings, and research gaps. Library & Information Science Research, 41(2), 93–101. <https://doi.org/10.1016/j.lisr.2019.04.001>
- Wungu, Dewi Arum. 2022. Modal Sosial Dalam Keterpilihan Calon Gubernur: Studi Kasus Karolin Margrer Natassa di Kalimantan Barat dan Khofifah Indar Prawansa di Jawa Timur pada Pilkada Serentak 2018. Journal of Politics and Policy. Vol. 4, 15 – 31.